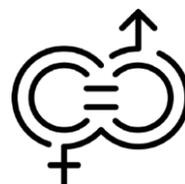


Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Program SKALA¹



GEDSI

Mei 2025

Konteks

Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) menekankan pentingnya kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Di Indonesia, berbagai tantangan seperti kesenjangan daerah, norma sosial dan budaya, serta ekonomi berdampak pada kelompok rentan. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan yang memastikan distribusi sumber daya yang adil serta akses terhadap layanan dasar bagi mereka yang membutuhkan. Integrasi prinsip GEDSI dalam tata kelola pemerintahan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan, perencanaan, dan layanan publik yang lebih inklusif, dengan memastikan bahwa suara kelompok rentan turut dilibatkan.

Indonesia telah mengambil langkah besar dalam mengarusutamakan GEDSI melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender menjadi tonggak penting yang mewajibkan integrasi gender dalam semua tahap pembangunan. Banyak pemerintah daerah juga telah menetapkan regulasi (perda dan atau yang lainnya) untuk memperkuat kesetaraan gender. Sejak 2012, pemerintah telah mengimplementasikan penganggaran yang responsif gender (Gender Responsive Budgeting/GRB), yang mewajibkan kementerian dan pemerintah daerah menyusun analisis gender serta anggaran yang inklusif. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029) menegaskan komitmen terhadap kesetaraan gender dan pembangunan inklusif, memberikan pedoman bagi kementerian dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih inklusif.

Di sisi lain, Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 menjadi pilar utama dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas, mencakup akses yang setara terhadap layanan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang inklusif. Implementasi standar pelayanan minimal (SPM) dalam layanan publik juga mencerminkan upaya pemerintah untuk melembagakan GEDSI dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Namun, masih terdapat berbagai tantangan sistemik dan sosial budaya yang menghambat penerapan GEDSI secara optimal di Indonesia. Ketidaksinambungan antara kebijakan GEDSI nasional dan daerah dengan proses perencanaan serta penganggaran yang lebih luas menghambat integrasi dan implementasi yang efektif. Norma sosial dan budaya, seperti stereotip gender dan stigma terhadap penyandang disabilitas, memperkuat eksklusi sosial.

¹ Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

Keterbatasan data dan kapasitas kelembagaan menjadi tantangan besar dalam penerapan GEDSI. Ketiadaan data terpadu dan terpilah yang dapat mengidentifikasi kelompok rentan, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang berbasis bukti. Selain itu, masih banyak aparat pemerintah yang belum memiliki kesadaran maupun keterampilan teknis dalam mengintegrasikan GEDSI ke dalam perencanaan dan penganggaran.

Keterbatasan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat. Keterbatasan sumber daya mencakup baik kurang anggaran yang dialokasikan untuk pengarusutamaan GEDSI, maupun keterbatasan sumber daya manusia, terutama kompetensi dan kapasitas dalam mengelola dan mendorong pengarusutamaan GEDSI. Rendahnya partisipasi, baik organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas (OPD) maupun organisasi komunitas lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah turut membentuk kompleksitas masalah pembangunan inklusif.

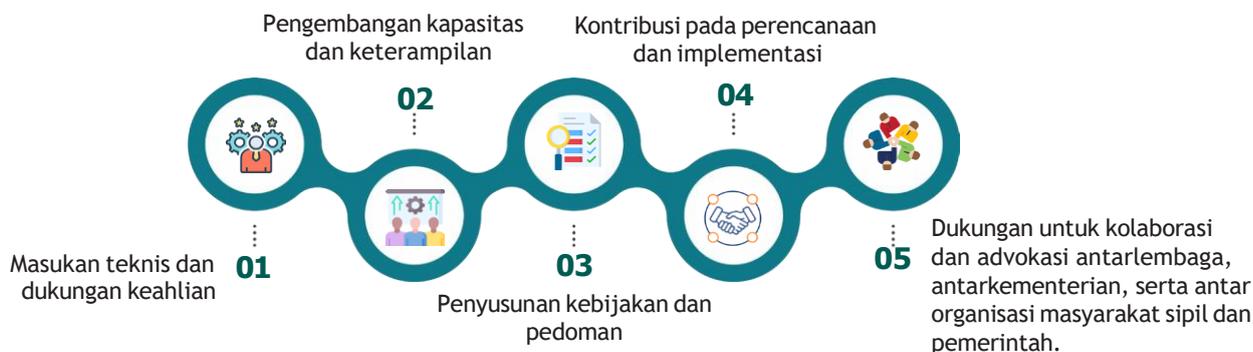
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terarah untuk memperkuat implementasi GEDSI, termasuk melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor dan mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan kebijakan dan program pembangunan yang inklusif.

Dukungan Program SKALA dalam Pengarusutamaan GEDSI untuk Layanan Dasar yang Inklusif

Program Kemitraan Australia-Indonesia, SKALA, bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. Sebagai program yang berfokus pada tata kelola, SKALA dirancang untuk memastikan bahwa instrumen tata kelola, seperti perencanaan dan penganggaran, disusun dan dikelola dengan cara yang mendorong penyediaan layanan yang lebih inklusif dengan mendorong pendekatan berikut ini:

- i. Partisipasi kelompok terpinggirkan dalam pengambilan keputusan pemerintah yang berdampak pada mereka, melalui keterlibatan langsung dalam jaringan masyarakat sipil.
- ii. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk memberikan insentif serta meningkatkan kualitas belanja publik guna memastikan layanan minimum yang lebih inklusif.

Dukungan aspek GEDSI di Program SKALA diberikan melalui:



Program SKALA mendorong terjadinya kolaborasi dan partisipasi Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dan pemerintah untuk memastikan pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Program tersebut menggunakan dua jalur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuannya:

- 1** Dengan memberikan akses ke data terkait kepada JMS dan mengembangkan kapasitas analitis mereka, Program SKALA memberdayakan jaringan ini untuk melakukan advokasi kolaboratif berbasis bukti untuk menyediakan layanan yang inklusif. Apabila didukung oleh pemerintah daerah dalam menganalisis dan menggunakan data ini, JMS dapat secara efektif memengaruhi forum perencanaan dan penganggaran yang inklusif. Program SKALA meningkatkan kegunaan sistem data, seperti portal data daring daerah, yang dapat diakses oleh para pengguna disabilitas netra di NTB, Aceh, dan Kalimantan Utara. Program tersebut juga mendukung integrasi data terpilah terkait dengan kebijakan ke dalam sistem ini sehingga jaringan masyarakat sipil memiliki bukti yang diperlukan untuk mengadvokasi akses yang adil ke layanan. Program SKALA memperkuat kapasitas JMS untuk lebih memahami penyusunan kebijakan dan proses pengambilan keputusan, serta menganalisis dan memanfaatkan data untuk advokasi.

2

Dengan memperkuat sistem, pedoman, dan forum pemerintah yang mendorong kolaborasi yang bermakna antara pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat sipil, Program SKALA mendorong tata kelola yang inklusif.

- i. Program SKALA bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun pedoman dan mekanisme perencanaan inklusif untuk memastikan partisipasi, memperjelas peran dan tanggung jawab, serta memberikan panduan yang lengkap tentang perencanaan pembangunan jangka menengah yang responsif gender. Program tersebut juga memperkuat kemampuan kementerian/ lembaga di pemerintah pusat untuk mengoordinasikan dan mengarahkan pemerintah daerah serta melakukan pengawasan dalam melembagakan praktik yang inklusif.
- ii. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Program SKALA memfasilitasi pelembagaan mekanisme forum perencanaan dan penganggaran inklusif yang mengakomodasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi disabilitas, kelompok adat, dan organisasi yang berfokus pada perubahan iklim. Forum ini disesuaikan dengan konteks setempat, berfungsi sebagai mekanisme bagi masyarakat sipil untuk memengaruhi kebijakan, seperti peraturan pelaksanaan pengarusutamaan gender, rencana aksi tentang kelanjutusiaan dan disabilitas, serta kebijakan tentang partisipasi masyarakat sipil. Program SKALA mendukung peningkatan kesadaran pemerintah daerah tentang nilai tambah keterlibatan JMS dalam pengembangan kebijakan. Forum-forum perencanaan inklusif ini memastikan pemerintah responsif dalam mendorong dan menindaklanjuti aspirasi kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.

Program SKALA mendukung tata kelola pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja layanan dasar yang inklusif. Upaya ini dikategorikan ke dalam tiga bidang:



GEDSI dalam Data dan Analisis untuk Perencanaan dan Penganggaran:

- i. Program SKALA berkolaborasi dengan kementerian pemampu di tingkat pusat untuk mengintegrasikan data yang terpilah berdasarkan gender ke dalam kerangka kebijakan dengan menggunakan platform seperti platform analitis SEPAKAT.² Platform ini membantu provinsi mitra Program SKALA untuk lebih memahami kebutuhan kelompok rentan dan mengubah analisis ini menjadi rencana dan anggaran yang dapat ditindaklanjuti untuk layanan dasar, seperti menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.
- ii. Untuk memastikan tata kelola yang inklusif di tingkat daerah, Program SKALA memperkuat sistem informasi desa untuk mengumpulkan data tentang penduduk terpinggirkan, termasuk perempuan dan perempuan kepala rumah tangga. SKALA juga mendukung peningkatan kapasitas para pejabat pemerintah untuk menggunakan anggaran dengan penanda gender dan melakukan analisis gender.

Dukungan data dan analitik dari Program SKALA diperkuat dengan upaya menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif, termasuk integrasi indikator responsif gender ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.



GEDSI dalam Pengelolaan Keuangan Publik (PFM):

- i. Program SKALA berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendorong penganggaran yang inklusif dengan menerapkan pendekatan seperti penandaan gender, yang diuji di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Gorontalo untuk penganggaran responsive gender. Kolaborasi dengan Kemenkeu juga berhasil mengintegrasikan penandaan sub-kegiatan yang responsive gender ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- ii. Pada periode awal, Program SKALA memberikan dukungan untuk membantu memantau transfer fiskal, sehingga memenuhi kebutuhan kelompok rentan, menghubungkan sistem data, seperti SIKD³ dan SIPD, dan menjajaki peluang untuk menggunakan platform perencanaan seperti SEPAKAT guna memudahkan analisis bagaimana anggaran yang responsif gender memperbaiki layanan.
- iii. Di tingkat daerah, Program SKALA mengembangkan kapasitas fiskal dengan membantu pemerintah daerah menyelaraskan anggaran dengan prioritas nasional dan SPM.

² Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu.

³ Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Di Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Barat, dukungan teknis berhasil meningkatkan alokasi anggaran untuk layanan dasar yang signifikan. Program SKALA juga mendorong layanan yang inklusif dengan mendukung keringanan pajak untuk kendaraan yang dimodifikasi bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari implementasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah (PDRD) di Kalimantan Utara, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Upaya ini membantu memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efisien dan memenuhi kebutuhan khusus perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok terpinggirkan.



GEDSI dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM):

- i. Di tingkat pusat, Program SKALA berkolaborasi dengan kementerian pengampu utama untuk mengintegrasikan indikator yang berfokus pada GEDSI ke dalam pedoman dan regulasi SPM sehingga penyediaan layanan dapat memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Untuk tujuan ini, Program SKALA mendukung penggunaan data terpilah dan sarana analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan akses dan kualitas layanan, seperti fasilitas yang responsif gender di sekolah atau layanan dasar kesehatan.
- ii. Di tingkat daerah, Program SKALA memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk meninjau dan menyesuaikan dokumen perencanaan, anggaran, dan proses penyediaan layanan agar lebih mencerminkan prioritas GEDSI. Dengan memfasilitasi mekanisme partisipatif seperti konsultasi publik dan diskusi kelompok terarah, Program SKALA berupaya memastikan bahwa kelompok rentan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan suara mereka menentukan kepatuhan daerah untuk pemenuhan SPM.

Rencana ke Depan



Pengarusutamaan Gender - Program SKALA terus bermitra dengan kementerian-kementerian pengampu utama untuk mendukung strategi pengarusutamaan gender, dengan berfokus pada pengembangan pedoman dan instrumen, penguatan sumber daya manusia, advokasi perbaikan kebijakan, dan kontribusi pada rencana aksi nasional dan daerah tentang kesetaraan gender. Upaya ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang memprioritaskan kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif.



GEDSI dalam bidang Data G Analisis, PFM serta SPM - Program SKALA terus mendukung mitra pemerintah untuk menerbitkan dan mengidentifikasi alokasi anggaran terkait GEDSI (gender budget tagging) sepanjang siklus penganggaran dengan memperkuat kebijakan tingkat pusat dan mengembangkan pedoman implementasi untuk pemerintah daerah, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan desentralisasi fiskal yang responsif gender.



Bekerja sama dengan Jaringan Masyarakat Sipil - Program SKALA terus berkolaborasi dengan jaringan masyarakat sipil untuk memperluas kesempatan bagi kelompok rentan dalam memperoleh akses yang sama ke layanan, fasilitas, dan mendapatkan manfaat melalui partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan penganggaran.



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

KONTAK KAMI



IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12G20



communications@skala.or.id
SKALA.or.id

